

IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DI DESA TULUNGREJO MELALUI POKDARWIS DHARMA NAGARI: STUDI KASUS WISATA HUTAN PINUS LOJI

Arveylia Alyssa Zahra¹, Narendra Kresna Widjanarko², Mirza Yazid Taftazany³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

emailpenulis

semuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi ekonomi kerakyatan di Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar melalui POKDARWIS Dharma Nagari dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Loji. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat berhasil mendorong gotong royong, kemandirian ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun, implementasi masih menghadapi kendala legalitas, birokrasi, resistensi sosial, dan regulasi. Keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen implementor, tujuan bersama, serta tata kelola yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan; Implementasi Kebijakan; POKDARWIS Dharma Nagari; Pemberdayaan Masyarakat; Wisata Desa.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the people's economy in Tulungrejo Village, Blitar Regency, through POKDARWIS Dharma Nagari in managing Loji Pine Forest Tourism. A qualitative case study approach was employed using interviews, observations, and documentation. The analysis was based on Van Meter and Van Horn's policy implementation indicators. The findings reveal that community-based tourism management promotes mutual cooperation, economic independence, employment opportunities, community participation, and stronger local institutions. However, implementation continues to face challenges related to legal status, bureaucracy, social resistance, and regulatory constraints. Success depends on implementers' commitment, shared goals, and sustainable governance.

Keywords: People's Economy; Policy Implementation; Dharma Nagari Tourism Awareness Group (POKDARWIS); Community Empowerment; Rural Tourism.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang secara ideal harus ada pada setiap desa guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Desa yang berhasil memberdayakan masyarakatnya secara maksimal dan efektif tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu upaya guna memberdayakan masyarakat desa demi kemajuan mereka adalah dengan memanfaatkan potensi desa yang bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakatnya. Namun pemberdayaan masyarakat desa sering kali terhambat oleh minimnya pengetahuan yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya inisiatif dari masyarakat desa untuk memaksimalkan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



pemberdayaan desanya sendiri. Fenomena inilah yang pada akhirnya membuat desa tidak mampu mengembangkan, dan memberdayakan potensi desa dan masyarakatnya secara penuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur. Guna memberdayakan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa, Desa Tulungrejo menciptakan Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS desa setempat sebagai otoritas utama dalam memberdayakan desa terutama dalam sektor wisata.

POKDARWIS yang diberi nama Dharma Nagari ini hadir dalam upaya untuk memberdayakan, dan memanfaatkan potensi desa demi kesejahteraan masyarakat desa Tulungrejo. Meskipun berstatus sebagai *Government Organization*, di mana bukan NGO atau Lembaga Independen, karena masih berafiliasi langsung dengan Dinas Perhutani, namun Dharma Nagari bergerak secara mandiri di lapangan. Mereka berperan sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga potensi desa dalam sektor pariwisata. Konsep yang mereka adopsi dalam menunjang mekanisme kinerja Organisasi, di mana memiliki garis besar dedikasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, disebut mereka sebagai konsep bernama Ekonomi Kerakyatan. Salah satu wisata di Desa Tulungrejo yang secara aktif mengimplementasikan konsep ekonomi kerakyatan adalah wisata Hutan Pinus Loji, yang menjadi studi kasus empirik dari artikel ini. Fenomena ini penulis rasa penting untuk diteliti baik secara akademik maupun empiris karena akan membantu untuk memahami bagaimana konsep ekonomi kerakyatan secara empiris diimplementasikan kepada masyarakat, serta memotret dedikasi perjuangan pemaksimalan pemberdayaan sumber daya yang ada di desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Research gap yang digunakan dalam mengisi kekurangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti mendapatkan *research gap* dari 2 karya yang berbeda. Pertama peneliti dapatkan *gap* dari karya dari Mubyarto (2014) berjudul Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan yang diterbitkan di PT Kompas Media Nusantara. Karya legendaris dari Prof. Mubyarto (pencetus teori Ekonomi Pancasila) ini membedah secara teoritis dan empiris bagaimana sistem ekonomi Indonesia seharusnya dibangun dari bawah (*bottom-up*) untuk menahan gempuran penetrasi modal besar (kapitalisme) yang meminggirkan hak-hak rakyat kecil. Celah penelitian yang ada di sini yaitu meletakkan fondasi makro tentang bagaimana ekonomi kerakyatan harus didukung oleh kebijakan negara dan penguatan koperasi tani formal. Penelitian ini mengisi celah dengan membawa diskursus ini ke level mikro-lokal kontemporer, di mana perlawanan terhadap kapitalisme dipelopori oleh otoritas Lembaga semi Independen Dharma Nagari di Desa Tulungrejo, bukan lewat regulasi formal pemerintah

Jurnal berjudul “Peran Non Governmental Organization (NGO) terhadap Kluster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali.” yang diterbitkan di Jurnal Wilayah dan Lingkungan oleh Wulan, R. M., & Muktiali, M. (2013). Memiliki fokus penelitian bagaimana NGO bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang mendampingi peternak lokal agar memiliki posisi tawar ekonomi yang kuat dan mandiri secara swadaya dari ketergantungan



tengkulak/kapitalis industri. Namun, celah Penelitian (*research gap*) pada penelitian Wulan & Muktiali, NGO diposisikan sebagai “mitra pendamping luar” yang bekerja sama dengan klaster bentukan pemerintah. Sementara itu, di Desa Tulungrejo, Lembaga semi Independen Dharma Nagari diadopsi oleh warga sebagai otoritas utama desa menggeser pelibatan resmi birokrasi dalam mengelola ekonomi desa. Celah relasi kuasa antara masyarakat, dan kelembagaan formal pemerintah di atas pemerintah desa, inilah yang menjadi kebaruan artikel ini.

Selanjutnya, untuk menganalisis fenomena empiris mengenai bagaimana sistem Ekonomi Kerakyatan dioperasionalkan di tingkat desa sebagai bentuk perlawanan terhadap penetrasi kapitalisme, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Dalam karya monumental mereka yang berjudul “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi adalah tahapan krusial yang menghubungkan antara keputusan/tujuan kebijakan dengan pencapaian dampak yang nyata di lapangan.

Meskipun model ini awalnya dirancang untuk menganalisis kebijakan publik formal dari otoritas negara, kerangka konseptual ini sangat relevan untuk memotret “kebijakan lokal” atau program strategis swadaya yang diadopsi oleh masyarakat Desa Tulungrejo bersama Dharma Nagari. Guna memberikan analisis yang tajam dan terarah, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga indikator utama dari model Van Meter dan Van Horn, yaitu:

1. *Standards and Objectives* (Standar dan Tujuan Kebijakan)

Van Meter dan Van Horn (1975, hlm. 463-465) menegaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur atau instrumen evaluasi keberhasilan, melainkan juga sebagai pedoman konkret bagi para aktor pelaksana dalam mengarahkan tindakan mereka. Jika standar dan tujuannya kabur, maka peluang terjadinya distorsi di lapangan akan semakin besar.

Dalam konteks penelitian di Desa Tulungrejo, indikator ini digunakan untuk membedah bagaimana cita-cita dari konsep Ekonomi Kerakyatan ditranslasikan menjadi target, aturan main, dan tujuan yang nyata oleh masyarakat dan pengelola program. Standar keberhasilan di sini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi linier (seperti dalam logika kapitalisme), melainkan pemerataan kesejahteraan, kemandirian ekonomi masyarakat, keterlibatan aktif kaum marhaen (rakyat kecil), serta efisiensi pemanfaatan potensi asli desa secara swadaya. Kajian pada indikator ini akan menjawab sejauh mana tujuan anti-kapitalistik tersebut dipahami secara seragam sebagai basis dasar gerakan.



2. *Economic, Social, and Political Conditions* (Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik)

Indikator kedua yang ditekankan oleh Van Meter dan Van Horn (1975, hlm. 471-473) adalah pengaruh lingkungan eksternal, yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan atau program tersebut diimplementasikan. Lingkungan ini dapat bertindak sebagai faktor pendukung (*enabler*) maupun faktor penghambat (*constraining factor*) yang membatasi ruang gerak para pelaksana program di lapangan. Pada artikel ini, indikator kondisi lingkungan digunakan untuk menganalisis tantangan dan dinamika eksternal yang melingkupi Desa Tulungrejo.

- Kondisi Ekonomi: Memotret bagaimana penetrasi modal besar atau sistem (kapitalisme lokal/birokrasi Pemerintah yang kurang efektif) telah merugikan dan membatasi kemajuan ekonomi masyarakat desa sebelum program berjalan.
- Kondisi Sosial: Menganalisis modal sosial masyarakat setempat, tingkat kohesi, kebersamaan, dan bagaimana struktur komunal warga merespons kehadiran alternatif ekonomi baru.
- Kondisi Politik: Menyoroti keunikan konstelasi politik lokal di Desa Tulungrejo, di mana warga memilih untuk mengadopsi lembaga Independen Dharma Nagari sebagai otoritas utama pemberdayaan ekonomi mereka dibandingkan menggantungkan diri pada pelibatan birokrasi atau otoritas resmi pemerintah desa. Analisis pada bagian ini sangat penting untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 4 mengenai tantangan dan hambatan implementasi.

3. *Disposition of Implementers* (Sikap atau Disposisi Implementor)

Indikator ketiga yang krusial menurut Van Meter dan Van Horn (1975, hlm. 473-475) berkaitan dengan karakteristik internal para pelaksana, yang meliputi sikap (*cognition*), komitmen, serta tingkat penerimaan atau penolakan (*response*) implementor terhadap kebijakan yang dijalankan. Keberhasilan implementasi mustahil tercapai apabila para aktor pelaksana tidak memiliki pemahaman mendalam dan keberpihakan ideologis yang kuat terhadap tujuan program.

Dalam arah penelitian Kelompok 59, implementor utama yang disoroti adalah pengurus POKDARWIS lokal Dharma Nagari bersama dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pengelola desa yang terlibat langsung. Indikator disposisi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana para aktor lembaga semi Independen tersebut memiliki komitmen ideologis terhadap nilai-nilai Ekonomi Kerakyatan. Sikap penerimaan dan militansi para implementor ini menjadi kunci utama mengapa mereka dinilai “lebih mampu” dan dipercaya oleh warga desa untuk mengelola potensi lokal ketimbang otoritas resmi formal. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana disposisi yang positif dari personil lembaga Independen Dharma Nagari mampu menggerakkan kesadaran kolektif warga dalam memberdayakan wisata desa pinus loji secara konsisten.



3. METODE

Metode penelitian yang peneliti pilih dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode ini dipilih karena peneliti ingin meneliti secara mendalam bagaimana Dharma Nagari mampu mengimplementasikan sistem ekonomi kerakyatan demi kemajuan desa. Data utama dalam penelitian ini adalah kombinasi antara wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yakni, ketua POKDARWIS, pengelola terpilih Dharma Nagari, dan Perangkat Desa Tulungrejo yang koheren dengan kebutuhan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah wawancara kualitatif terhadap narasumber yang relevan dan koheren dengan kebutuhan data penelitian.

Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memahami makna mendalam terkait masalah penelitian. Wawancara kualitatif peneliti pilih guna memahami pengalaman, pandangan, serta makna dari sudut pandang partisipan/narasumber. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teori. Dua triangulasi ini peneliti pilih karena sesuai dengan sumber dan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih. triangulasi sumber digunakan guna mengecek kebenaran data melalui wawancara/pengumpulan informasi dari beberapa informan yang berbeda, sementara triangulasi teori juga tak kalah penting guna memastikan bahwa hasil temuan atau kesimpulan akhir memiliki basis teori yang mendalam. Prosedur pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan yakni, identifikasi masalah, observasi melalui wawancara, dan tahap analisis data serta penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data menggunakan teknik coding tema dan analisis tematik. Kedua teknik analisis data ini dipilih karena koheren dengan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih yakni wawancara kualitatif. Melalui analisis tematik peneliti dapat menguraikan dan memahami makna serta tema-tema penting yang muncul dalam hasil wawancara peneliti. Sementara teknik pengkodean digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema, atau kategori tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Desa Tulungrejo

a. Awal Terimplementasinya Konsep Ekonomi Kerakyatan di Desa Tulungrejo

Implementasi ekonomi kerakyatan di Desa Tulungrejo berawal dari permasalahan pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi desa. Dimana sebelum secara aktif terimplementasi konsep ekonomi kerakyatan, Desa Tulungrejo kala itu terbilang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan desa lain di lingkup Kabupaten Blitar. Selain birokrasi kabupaten Blitar terkenal cukup sulit dan cenderung berbelit. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada, Desa Tulungrejo, melalui otoritas desa setempat mengambil inisiatif untuk secara mandiri memberdayakan sumber daya mereka. Sektor yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah ekonomi kerakyatan, yang di mana nanti akan diimplementasikan pada berbagai Pariwisata yang ada, Hutan Pinus Loji salah



satunya. Melalui lembaga-lembaga setempat seperti LMDH, KTH (Kelompok Tani Hutan) beserta POKDARWIS Dharma Nagari, bersinergi dan mengambil sikap bersama secara administratif untuk mengelola wisata Hutan Pinus Loji. Namun pada realisasinya, Dharma Nagari menjadi pengelola utama dalam wisata Hutan Pinus tersebut, mereka secara mandiri mengelola setiap potensi yang ada, termasuk seluruh hasil investasinya yang berasal dari masyarakat desa dan hasilnya akan kembali kepada masyarakat (Sulhendar, 2026). Berdasarkan permasalahan dan inisiatif inilah implementasi konsep ekonomi kerakyatan terealisasi.

b. Deskripsi peran Dharma Nagari dalam menggerakkan roda ekonomi desa

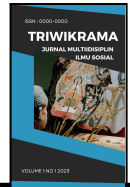
Salah satu lembaga yang memiliki peran krusial terkait pengembangan sumber daya manusia, potensi desa, serta sektor wisata adalah POKDARWIS desa Tulungrejo bernama Dharma Nagari. Dharma Nagari sendiri merupakan sekelompok aktor utama di desa Tulungrejo yang menjadi instrumen krusial dalam pengimplementasian konsep ekonomi kerakyatan. Dharma Nagari memiliki sejarah yang panjang sebelum bisa menjadi seperti sekarang. Semua berawal dari tahun 2018, di mana masih belum adanya kesadaran akan pengelolaan potensi dalam sektor wisata, masih adanya ketergantungan akan Pemerintah yang kolot, hingga kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Namun, revolusi dari Sulhendar, beliau sekarang merupakan Ketua Kelompok Sadar Wisata Dharma Nagari, yang berjasa dalam memelopori lahirnya Dharma Nagari, beliau berhasil membawa kebaruan keadaan dalam sektor wisata di bumi Tulungrejo. Dia, bersama beberapa rekan se-tim nya berjuang dengan berlandaskan semangat Marhaenisme, di mana, tujuan utamanya ialah mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Beliau dan rekan-rekan berhasil mengembangkan Dharma Nagari mulai dari awal hingga kini, Dharma Nagari telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sehingga tercipta peluang ekonomi, lapangan kerja baru, pengembangan pengelolaan sektor wisata, bahkan sampai pelatihan bagi sumber daya manusia guna memajukan Desa Tulungrejo (Sulhendar, 2026).

Dinamika, dan Kondisi Sosial, Ekonomi Desa Tulungrejo

a. Sebelum Adanya Dharma Nagari

Desa Tulungrejo sendiri tak terlepas dari dinamika sosial dan ekonomi yang melekat. Jika ditarik melalui sejarah, Desa Tulungrejo sebelum hadirnya Dharma Nagari merupakan desa yang tertinggal. Desa Tulungrejo disebutkan selalu menjadi contoh buruk sebagai desa tertinggal bagi berbagai desa Kabupaten Blitar (Sulhendar, 2026). Permasalahan-permasalahan seperti kurangnya SDM desa, kurangnya lapangan pekerjaan, tidak memiliki kesadaran akan potensi desa, merupakan realitas kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa yang harus dihadapi. Selain itu, hasil wawancara peneliti menunjukkan adanya permasalahan budaya kerja masyarakat desa dengan perusahaan kapital yang turut hadir dan mengeksploitasi sumber daya alam di Desa Tulungrejo. Perusahaan kapitalistik



tersebut merupakan perusahaan di mana sebelumnya mayoritas masyarakat desa mencari nafkah, namun sangat disayangkan, perusahaan tersebut memiliki budaya kerja yang profit sentris, menindas serta feodalistik (Sulhendar, 2026).

b. Setelah Hadir, & Aktifnya Dharma Nagari

Setelah hadir, dan mulai aktifnya Dharma Nagari yang merupakan hasil inisiatif dari masyarakat Desa Tulungrejo yang sadar akan potensi desanya, perlahan tapi pasti, Desa Tulungrejo berkembang dan mulai mengejar ketertinggalan. Sektor wisata yang menjadi daya jual utama desa mulai dikembangkan secara bertahap namun konsisten. Secara empiris, hasil dari perjuangan dan komitmen Dharma Nagari dalam memajukan wisata desa terlihat melalui wisata ikonik Desa Tulungrejo yang kini menjadi nilai jual utama wisata desa yakni, agrowisata Hutan Pinus Loji.

c. Dampak Empiris Implementasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Melalui Dharma Nagari Pada Wisata Pinus Loji Terhadap Masyarakat Desa Tulungrejo

Secara empiris, dampak akan implementasi konsep ekonomi kerakyatan di Desa Tulungrejo terlihat melalui berhasilnya Dharma Nagari dalam memberdayakan dan memaksimalkan potensi masyarakat, dan desa itu sendiri melalui sektor wisata, khususnya wisata Hutan Pinus Loji. Terdapat 3 dampak utama yang berhasil peneliti identifikasi sebagai dampak akan implementasi ekonomi kerakyatan melalui Dharma Nagari dalam studi kasus wisata Hutan Pinus Loji, yang pertama adalah meningkatnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, kesadaran masyarakat desa akan potensi wisata desa mereka serta manajemen wisata desa yang mengimplementasikan konsep ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks lapangan pekerjaan, dengan adanya Dharma Nagari yang mengintegrasikan sektor wisata desa, secara otomatis aktif mengenalkan wisata desa kepada masyarakat luar. Banyak masyarakat Desa Tulungrejo yang turut merasakan dampaknya, seperti berjualan di tempat wisata Hutan Pinus Loji yang juga menjadi pintu gerbang bagi pendakian Gunung Kelud. Selanjutnya, terkait kesadaran masyarakat desa akan potensi wisata mereka. Melalui Dharma Nagari, masyarakat Desa Tulungrejo yang sebelumnya belum menyadari akan potensi wisata desanya kini tidak hanya menyadari namun juga turut merasakan dan berpartisipasi dalam mengangkat potensi wisata desanya dalam rangka mensejahterakan mereka, sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan, dari rakyat untuk rakyat. Aktor-aktor Dharma Nagari yang memiliki pengetahuan lebih terkait teknologi, serta memiliki akses terhadap dunia digital, secara efektif berhasil mengenalkan serta meningkatkan kesadaran akan potensi wisata melalui visualisasi video profil desa yang disosialisasikan kepada masyarakat (Sulhendar, 2026). Selain itu Dharma Nagari sebagai POKDARWIS yang bergerak secara terorganisir turut membantu terkait pengurusan legalitas dan birokrasi tanah wisata Desa Tulungrejo,



seperti program PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) dari KLHK (Sulhendar, 2026).

d. Keberhasilan Implementasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Indikator Van Meter & Van Horn

Proses penerapan konsep ekonomi kerakyatan menjadi sebuah hasil nyata di lapangan membutuhkan ruang diskusi yang kompleks. Dalam menganalisis implementasi kebijakan lokal berbasis swadaya di Desa Tulungrejo melalui POKDARWIS Dharma Nagari pada Wisata Pinus Loji, kerangka pemikiran Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) menyediakan landasan teoritis yang komprehensif. Kebijakan lokal ini tidak bergerak begitu saja tanpa adanya faktor yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya, melainkan ditentukan oleh jalinan antara struktural dan karakteristik perilaku para aktor di tingkat bawah (Van Meter & Van Horn, 1975). Bagian ini membahas bagaimana pengoperasionalisasi konsep tersebut melalui tiga dimensi utama model Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi implementor (Van Meter & Van Horn, 1975).

- *Standards and Objectives* (Standar dan Tujuan Kebijakan)

Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar dan tujuan mendasar yang dipahami oleh para pelaksana. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, melainkan menjadi *guideline* agar tidak terjadi distorsi misi di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam konteks Desa Tulungrejo, cita-cita ekonomi kerakyatan diterjemahkan ke dalam standar baku yang berbasis pada asas gotong royong, kemandirian lokal, dan penolakan terhadap modal dari investor luar (Sulhendar, 2026).

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pada fase awal, standar normatif tersebut mengalami hambatan akibat tata kelola yang bersifat informal serta minimnya kepastian hukum (Ayung, 2026). Aktualisasi tujuan ekonomi kerakyatan baru menemukan bentuk konkritnya ketika para implementor menginisiasi aspek legalitas formal (Ayung, 2026). Sebagaimana terekam dalam dinamika internal Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Dadi dan POKDARWIS, pengelolaan kawasan dialihkan dari pola informal yang non-prosedural “*preman*” menuju penguatan institusi melalui penyusunan Akta Notaris dan pengaktifan institusi Koperasi (Ayung, 2026).

Maka dari itu pentingnya kejelasan standar dan tujuan untuk menghindari distorsi dan mencapai pemerataan kesejahteraan, data empirik menunjukkan bagaimana masyarakat lokal berhasil menerjemahkan cita-cita anti-eksploitasi menjadi aturan main yang nyata melalui reformasi dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku selama 2 tahun sekali. Namun standar awal yang berlaku sangat merugikan bagi para pengelola dan masyarakat karena porsi bagi hasil masih 60% untuk pengelola dan 40% untuk



Perhutani dipotong di awal oleh pihak Perhutani, sehingga berdampak pada pendapatan pengelola, yakni hanya Rp20.000 per bulan per kepala.

Dari sana, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pengelola menegosiasikan tujuan baru dengan membalikkan urutan pemotongan dengan mengeluarkan alokasi operasional 30% di awal serta mengubah skema bagi hasil menjadi 70% untuk LMDH dan 30% untuk Perhutani. Standar baru yang jelas ini terbukti berhasil meningkatkan pendapatan pengelola secara drastis, menyehatkan kas LMDH untuk mendanai infrastruktur swadaya seperti pengaspalan jalan dan pembukaan air terjun. Diharapkan pada masa PKS selanjutnya bersama Kemitraan Kehutanan (KKP) dapat terwujud skema pembagian hasil 80-20 dengan perlindungan PNPB yang tetap terjamin.

- **Economic, Social, and Political Conditions (Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik).**

Indikator kedua dalam model Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti pengaruh lingkungan eksternal sebagai faktor yang dapat mendukung (*enabler*) atau membatasi (*constraining*) jalannya implementasi. Lingkungan makro dan mikro di sekitar Desa Tulungrejo membentuk dinamika tersendiri yang menguji daya tahan konsep ekonomi kerakyatan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Kondisi Ekonomi: Sebelum program wisata Pinus Loji berjalan secara terorganisir, pada tahun 2018 para pengelola masa awal-awal mengajak beberapa warga untuk patungan (seperti Investor masuk) guna mengumpulkan modal awal untuk pengembangan wisata Pinus Loji, kemudian terkumpul 40 warga yang masing-masing menyumbang Rp500.000 (Ayung, 2026). Meskipun sudah terhimpun modal, hambatan tetap membayangi masa awal implementasi, di mana pengelolaan pariwisata belum mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi (Hasil Ayung, 2026). Fakta empiris memperlihatkan pengelola pariwisata sempat hanya menerima pendapatan bersih sebesar Rp20.000 dalam sebulan (Ayung, 2026). Rendahnya insentif finansial ini disebabkan oleh formula pembagian keuntungan pariwisata yang harus dipotong sebesar 40% untuk pihak Perhutani, sementara sisa pendapatannya harus dibagi rata kepada 40 orang pengelola yang ada, serta biaya operasional pengelolaan wisata (Ayung, 2026). Realitas ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi yang berat di tingkat akar, sebelum manajemen pengelola mampu mendistribusikan profit secara layak untuk standar UMR dan jaminan sosial (Sulhendar, 2026).

Kondisi Sosial: Struktur komunal masyarakat desa tidak serta-merta menerima kehadiran alternatif ekonomi baru ini secara terbuka (Ayung, 2026). Para pengelola sempat diuji oleh skeptisisme dan resistensi sosial



internal berupa cibiran dari warga komunitas mereka sendiri terhadap keberadaan pariwisata lokal (Ayung, 2026). Tekanan sosial tersebut justru menjadi pemicu psikologis bagi para pengelola pariwisata untuk membuktikan kemandirian ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat (Sulhendar, 2026). Kesadaran kolektif masyarakat lambat laun berubah menjadi dukungan setelah tahun 2022 wisata Pinus Loji meledak pengunjung sehingga para masyarakat berbondong-bondong meminta “jatah” kepada para pengelola, dari situlah para masyarakat secara sadar ingin mendukung wisata Pinus Loji (Ayung, 2026).

Kondisi Politik: Konstelasi politik lokal di Desa Tulungrejo diwarnai oleh tantangan birokrasi daerah yang kompleks serta rentan terhadap guncangan regulasi eksternal (Sulhendar, 2026). Sebagai contoh, dampak dari sebuah kasus parkir yang viral di Makam Bung Karno memicu dilaksanakannya inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh oleh unit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ke kawasan Wisata Pinus Loji (Ayung, 2026). Tekanan politik formal ini sempat terjadi di Wisata Hutan Pinus Loji, di mana permasalahan terkait legalitas bangunan fisik warung di atas komoditas hutan yang dinilai melanggar aturan karena menggunakan fondasi berbahan semen cor permanen, bukan material ramah lingkungan (Ayung, 2026). Untuk menghadapi tekanan eksternal birokrasi dan aparat penegak hukum tersebut, para pelaksana memanfaatkan modal politik jaringan (*network*), kemampuan advokasi hukum, serta pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh perangkat desa seperti Mas Carik (Sulhendar) dan Mas Warno demi menjaga eksistensi pengelolaan wisata (Ayung, 2026).

- **Disposition of Implementers (Sikap atau Disposisi Implementor)**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975, hlm. 473-475), keberhasilan implementasi tidak mungkin berhasil jika aktor pelaksana tidak memiliki pemahaman mendalam dan keberpihakan ideologis yang kuat dalam konteks ini ekonomi kerakyatan terhadap tujuan program. Sesuai dengan indikator yang dijelaskan Van Meter, dan Van Horn, terkait sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan atau penolakan implementor terhadap kebijakan yang dijalankan, Aktor pelaksana Dharma Nagari dalam konteks kawasan Wisata Pinus Loji secara efektif memahami dan berhasil mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan mereka, dalam memahami konsep termasuk keberpihakan mereka terhadap konsep tersebut.

Sikap & Komitmen: Sikap dan komitmen implementor Dharma Nagari dalam mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi kerakyatan di kawasan Wisata Pinus Loji terlihat dari beberapa sektor. Pertama, dari sektor manajerial Dharma Nagari sendiri terkait profit dari wisata desa termasuk kawasan wisata Hutan Pinus Loji dikelola oleh Dharma Nagari dalam bentuk koperasi. Profit akan wisata yang dikelola tidak digunakan untuk



kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama, seperti menggaji para pekerja sesuai UMR, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan (JHT) para pekerja, serta kas bersama (Sulhendar, 2026). Kedua terkait komitmen dan pemahaman akan konsep ekonomi kerakyatan, terlihat dari tujuan akan praktik Dharma Nagari oleh implementor, sebagai alat dari implementasi konsep ekonomi kerakyatan Desa Tulungrejo, dibangun atas asas gotong royong. Prinsipnya adalah seluruh potensi desa harus dikelola, dan dinikmati oleh masyarakat desa, tanpa melibatkan campur tangan dari investor luar (Sulhendar, 2026).

Tingkat Penolakan & Penerimaan: Dharma Nagari, dalam konteks kawasan Wisata Hutan Pinus Loji, memiliki beberapa dinamika yang turut menjadi nilai dalam indikator tingkat penolakan dan penerimaan. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi selama berjalannya kawasan wisata Hutan Pinus Loji dibawah Dharma Nagari. Mulai dari awal berdirinya pada tahun 2018, wisata Hutan Pinus Loji terus mengalami penolakan maupun penerimaan baik dari masyarakat maupun implementor itu sendiri (Ayung, 2026). Masyarakat yang dimaksud disini mencakup investor dan masyarakat disekitar lokasi wisata Pinus Loji. Berawal dari diberdayakannya wisata Pinus Loji melalui Dharma Nagari kala itu masyarakat Desa Tulungrejo belum menyadari potensi wisata Hutan Pinus Loji, hingga pada tahun 2022, ketika wisata Hutan Pinus Loji mulai menunjukkan potensi termasuk profit yang signifikan, masyarakat Desa Tulungrejo mulai menyadari potensi wisata tersebut dan menginginkan keuntungan dari wisata tersebut melalui pungutan liar (Ayung, 2026). Hal inilah yang menjadi bagian dari penolakan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep ekonomi kerakyatan di Desa Tulungrejo melalui POKDARWIS Dharma Nagari telah berjalan secara efektif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya melalui pengelolaan Wisata Hutan Pinus Loji. Implementasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan wisata. Model pengelolaan tersebut mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan gotong royong, kemandirian, pemerataan manfaat, serta keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi didukung oleh kejelasan tujuan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kemampuan implementor dalam mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai ekonomi kerakyatan, serta kemampuan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



adaptasi terhadap dinamika kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Secara empiris, implementasi ekonomi kerakyatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja, tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi wisata desa, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, serta berkembangnya tata kelola wisata yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, POKDARWIS Dharma Nagari dapat dipandang sebagai bentuk kelembagaan lokal yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan secara nyata dalam mendukung pembangunan desa berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kelembagaan POKDARWIS Dharma Nagari melalui penyempurnaan aspek legalitas, tata kelola organisasi, serta sistem pengelolaan keuangan agar implementasi ekonomi kerakyatan dapat berlangsung secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pendampingan, fasilitasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur pendukung tanpa mengurangi kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi wisata desa.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi ekonomi kerakyatan pada berbagai sektor pembangunan desa selain pariwisata, atau melakukan studi komparatif antar desa yang menerapkan model pemberdayaan serupa. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang implementasi ekonomi kerakyatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi desa, serta penguatan kelembagaan lokal sehingga mampu memperkaya pengembangan teori maupun praktik implementasi kebijakan berbasis masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eovriza Luluk Zakia, I. W. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa. *TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 3, 1-11.
- Farazmand, A. (2004). "Sound Governance in the Age of Globalization: A Conceptual Framework", in Ali Farzmand, ed., *Sound Governance: Policy and Administrative Innovation*. Wesport: Preager.
- Gash, C. A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Gibson, R. (2011). A Primer on Collaborative Multi-Level Governance. In *Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials*, 1-11.
- Jo Ann, G. E. (2001). Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation. *Igrass 2001*, 1, 1-5.
- M. Rosyid Ridla, B. M. (2016). ANALISIS SOUND GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SANG PERGURUAN TINGGI ISLAM (Studi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). *Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 213-229.
- Maulana, A. (2023). *AKSELERASI PEMERINTAH DAERAH MENUJU AGILE GOVERNANCE (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Disertasi, Universitas Jember.
- Mukhtar Tompo, M. M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 43-52.
- Mubyarto. (2014). Reformasi sistem ekonomi: Dari kapitalis menuju ekonomi kerakyatan. PT Kompas Media Nusantara.
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALTATIF*. Bandung: Harfa Creative.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahyuningsih, I. S. (2021). PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WISATA ROTAN TRANGSAN, GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO. *Global Financial Accounting Journal*, 5, 1-5.
- Wicaksono, I. (2021). INTEGRATION OF DEVELOPMENT PROGRAMS BASED ON COLLABORATIVE GOVERNANCE ON REGIONAL VILLAGE. *Jurnal Politico*, 21(1), 53-66.



Wulan, R. M., & Muktiali, M. (2013). Peran non governmental organization (NGO) terhadap klaster susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(2), 183-200.

Zulkarnain, A. &. (2014, April15). Komitmen Terhadap Organisasi Ditinjau Dari Kesejahteraan Psikologis Pekerja. *INSAN*, 54-62.